



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD JAINI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **897901**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.012.040.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/8 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/158 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 12500 m2/12500 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
4. Tanah Seluas 9421.4 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
5. Tanah Seluas 3671.46 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 222.040.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>207.518.518</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.259.058.518</b>



III. HUTANG

Rp. 436.721.829

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.822.336.689

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.